

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH NELAYAN ASING (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung No 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)

#### Jabaik Nainggolan

*Illegal fishing* bukan lagi menjadi hal yang tabu dan baru untuk diperbincangkan di berbagai negara karena Illegal Fishing merupakan suatu kejahatan yang bisa merugikan suatu negara serta melanggar aturan hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Nelayan yang berasal dari negara luar sering melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan mereka untuk memperoleh keuntungan dua kali lipat dan melakukan transaksi jual beli diluar dari wilayah Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut hukum positif di Indonesia, Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dan Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing adalah berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku Illegal Fishing di ZEEI. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit penjatuhan hukuman oleh hakim yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa adanya pidana penjara badan terhadap pelaku yang bertanggungjawab dalam kegiatan ilegal fishing hal ini dapat dirasa kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana denda sesuai tuntutan jaksa penuntut umum menurut penulis kurang tepat seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana denda maksimal.

Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kepabeanan, Illegal Fishing, Nelayan Asing.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PEOPLE OF ILLEGAL FISHING CRIMES COMMITTED BY FOREIGN FISHERMEN**

**(Study of Bitung District Court Decision No. 12/Pid.Sus/2020/PN. Bit)**

**Jabaik Nainggolan**

*Illegal fishing is no longer a taboo and new thing to be discussed in various countries because Illegal Fishing is a crime that can harm a country and violate legal rules, both national and international law. Fishermen from foreign countries often commit fish theft in Indonesian waters. They did this to get double the profits and carry out buying and selling transactions outside the territory of Indonesia.*

*The problems in this thesis research are: How is the legal regulation of perpetrators of illegal fishing crimes according to positive law in Indonesia, How is criminal law enforced against perpetrators of illegal fishing crimes committed by foreign fishermen and What are the legal considerations by judges in sentencing criminals to perpetrators of illegal crimes fishing carried out by foreign fishermen in Bitung District Court Decision Number 12/Pid.Sus/2020/PN. Beets.*

*The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data*

*The conclusion in this thesis research is that legal regulations for perpetrators of illegal fishing crimes according to positive law in Indonesia are regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Criminal law enforcement against perpetrators of illegal fishing crimes committed by foreign fishermen takes the form of administrative sanctions (revocation of permits), physical confinement (prison) or fines. and these sanctions can have a deterrent effect on perpetrators of Illegal Fishing in ZEEI. Legal considerations by the judge in imposing a crime in Decision Number 12/Pid.Sus/2020/PN. In the author's opinion, the author believes that the imposition of a sentence by a judge who only imposes a fine without any physical imprisonment on the perpetrator responsible for illegal fishing activities has a deterrent effect on the perpetrator and the decision of the panel of judges to impose a fine according to the demands of the public prosecutor is not appropriate. The panel of judges should impose a maximum fine.*

**Keywords : Law Enforcement, Crime, Customs, Illegal Fishing, Foreign Fishermen.**